

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah, Salim HS, dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Badruzaman, Mariam Darus, et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia, 2005.

Harmanses, R. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Bandung: Djambatan, 1997.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1979.

Notodisoerjo, Raden Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Pittlo. A. *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif. Jakarta: Intermedia, 1978.

Pradjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.

Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyna. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Soedjendro, Kartini. *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Subekti. R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian*. Bandung: Bina Cipta, 1987.

\_\_\_\_\_ *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1998.

Subekti R. & Tjitrosoedibio R.. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

\_\_\_\_\_ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Pokok Agraria, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah.

## **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2961 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 483/PDT/2016/PT. DKI tanggal 13 Desember 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 562/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2015

#### **D. Artikel**

Budiono, Herlien. "Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak." *Majalah Renvoi*, Maret 2004, 57.

Lisah, Nin Yasmine. "Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum" (On-line), tersedia di [WW:http://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum.html](http://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum.html) (31 Mei 2012).

Sasauw, Christin. "*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015.

Ridwan Kamil. "Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli" (On-line), tersedia di [WWW:http://www.infodanpengertian.com/hukum-pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html](http://www.infodanpengertian.com/hukum-pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html) (12 Januari 2015).